
BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018 disusun berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Penjabaran lebih lanjut penyusunan LPPD Tahun 2018 mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/9804/OTDA tanggal 17 Desember 2018 perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.

Dasar hukum penyusunan LPPD Tahun 2018, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018; dan
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.

B. Gambaran Umum Daerah

1. Kondisi Geografis Daerah

Kondisi geografis Provinsi Jawa Tengah secara administratif, letak wilayahnya berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Luas wilayah sebesar 3.254.412 Ha atau 25,04 % dari luas Pulau Jawa dan terletak di 5⁰40' - 8⁰30' Lintang Selatan dan 108⁰30' - 111⁰30' Bujur Timur. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 753 Kelurahan. Batas administrasi Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 1.1.



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Gambar 1.1. Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah

2. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan proyeksi BPS, jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebanyak 34.490.835 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kabupaten Brebes sebanyak 1.802.829 jiwa, diikuti Kota Semarang sebanyak 1.786.114 jiwa dan Kabupaten Cilacap sebanyak 1.719.504 jiwa. Jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kota Magelang sebanyak 121.872 jiwa diikuti Kota Salatiga sebanyak 191.571 jiwa dan kemudian Kota Tegal sebanyak 249.003 jiwa. Kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah sebesar 1.052 jiwa/km² dengan wilayah terpadat di Kota Surakarta sebesar 11.256 jiwa/km², diikuti Kota Magelang sebesar 7.589 jiwa/km² dan Kota Pekalongan sebesar 6.729 jiwa/km² serta yang paling rendah kepadatannya adalah Kabupaten Blora yaitu sebesar 478 jiwa/km², diikuti oleh Kabupaten Wonogiri

sebesar 534 jiwa/km² dan Kabupaten Purworejo sebesar 656 jiwa/km². Struktur penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 berdasarkan kelompok umur menunjukkan bahwa penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 23.363.185 jiwa, lebih banyak dibandingkan penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) sebanyak 11.127.650 jiwa

Jumlah penduduk Jawa Tengah yang berusia 15 tahun keatas bekerja di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan menempati persentase tertinggi yaitu 27,28% atau sebanyak 4,76 juta jiwa, kemudian disusul sektor perdagangan rumah makan dan jasa akomodasi sebesar 25,64% atau 4,48 juta dan selanjutnya sektor industri sebesar 21,49% atau 3,75 juta jiwa. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan bila dibanding dengan Tahun 2017, yaitu pada Tahun 2017 sebanyak 4,97 juta jiwa atau 28,51%, menurun menjadi 4,76 juta jiwa atau 27,28% pada Tahun 2018. Sedangkan jumlah penduduk yang bekerja di sektor perdagangan dan industri mengalami kenaikan, yaitu di sektor perdagangan pada Tahun 2017 sebanyak 23,64% atau 4,12 juta jiwa meningkat menjadi 25,64 % atau 4,48 juta jiwa pada Tahun 2018. Penduduk yang bekerja di sektor industri mengalami peningkatan dari 3,60 juta jiwa atau 20,64% pada Tahun 2018 menjadi 3,75 juta jiwa atau 21,49%.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Daerah

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Tahun 2018 perekonomian Jawa Tengah Tahun 2018 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha seperti tahun sebelumnya. Lapangan usaha yang mendominasi ekonomi Jawa Tengah yaitu: industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 34,50%; pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi 14,04%; serta perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi 13,51%.

Pengembangan sektor industri di Jawa Tengah didominasi oleh kontribusi produk-produk unggulan yaitu: tekstil dan produk tekstil, batik, kayu olahan, logam dan permesinan, kerajinan dan makanan olahan. Sedangkan pengembangan produk unggulan batik beriringan dengan

pengembangan produk unggulan pendukung berupa kerajinan ukir, serta tenun dan bordir.

Sektor pertanian diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Pada sub sektor tanaman pangan, potensi daerah diarahkan untuk pemenuhan produksi komoditas utama tanaman pangan yaitu: padi, jagung dan kedelai. Pada sub sektor hortikultura, komoditas unggulan yang dikembangkan yaitu bawang merah dan cabai besar. Adapun untuk sub sektor perkebunan, komoditas unggulan yaitu tebu dan kelapa.

Sub sektor peternakan, komoditas utama yang dikembangkan berdasarkan master plan pengembangan peternakan Jawa Tengah yang disusun Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu: sapi potong, kerbau, sapi perah, kambing, domba, ayam lokal dan itik.

Sub sektor perikanan, komoditas unggulan yang dikembangkan berdasarkan potensi yang dimiliki Jawa Tengah adalah komoditas udang windu dan vanamei, nila, bandeng, lele, gurami, tawes, kerapu, karper, rumput laut dan nila salin. Perdagangan sebagai salah satu sektor unggulan dan penyumbang dalam perekonomian Jawa Tengah senantiasa dikembangkan melalui peningkatan distribusi barang, pengembangan akses dan informasi pasar, serta revitalisasi pasar rakyat.

b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar 5,32% meningkat 0,6% dari tahun 2017, yaitu 5,26%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada periode tersebut juga lebih tinggi dibanding nasional yang tumbuh 5,17%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 12,39% diikuti jasa perusahaan sebesar 9,48% dan jasa lainnya yang tumbuh 9,45%.

Dua lapangan usaha unggulan yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Tengah, yaitu: industri pengolahan dan pertanian, kehutanan, dan perikanan, mengalami pertumbuhan yang menguat dibandingkan dengan tahun 2017. Lapangan usaha industri pengolahan tahun 2018 tumbuh 4,35%, menguat 0,02 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh 4,33%. Sementara lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 2,63%, menguat 0,97 poin dibandingkan tahun

sebelumnya yang tumbuh 1,66%. Data Pertumbuhan Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.

Persentase Pertumbuhan Lapangan Usaha yang berkontribusi terhadap Perekonomian Jawa Tengah Tahun 2017-2018

NO	LAPANGAN USAHA	PROSENTASE PERTUMBUHAN (%)		
		2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,32	1,66	2,63
2	Pertambangan dan Penggalian	0,38	5,19	2,45
3	Industri Pengolahan	1,44	4,33	4,35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	5,22	5,36
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	6,51	4,88
6	Konstruksi	0,66	7,13	6,07
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,80	6,01	5,70
8	Transportasi dan Pergudangan	0,16	6,30	7,55
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,20	6,45	8,17
10	Informasi dan Komunikasi	0,34	13,27	12,39
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,24	5,17	3,58
12	Real Estate	0,12	6,48	5,58
13	Jasa Perusahaan	0,04	8,72	9,48
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,07	2,57	4,43
15	Jasa Pendidikan	0,28	6,97	7,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,08	8,60	8,80
17	Jasa lainnya	0,13	8,98	9,45
	PDRB	5,27	5,26	5,32

Sumber: BPS Jateng, 2018 diolah

Dari tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa lapangan usaha informasi dan Komunikasi masih mengalami prosentasi pertumbuhan tertinggi di antara 17 lapangan usaha yang berkontribusi terhadap perekonomian Jawa Tengah. Fenomena ini disebabkan karena penggunaan data Internet untuk media sosial, transaksi *online*, dan sebagainya konsisten meningkat.

Perkembangan teknologi yang diikuti dengan meningkatnya kesadaran teknologi masyarakat mendorong penggunaan teknologi informasi dalam berbagai macam kegiatan usaha. Tidak hanya pelaku usaha, pemanfaatan teknologi oleh instansi pemerintah juga meningkat, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah semakin gencar dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugasnya, seperti melalui pengembangan aplikasi *mobile* berbasis Android. Sementara itu, di tahun 2018 prosentase pertumbuhan lapangan usaha konstruksi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 7,13% di tahun 2017 menjadi 6,07% di tahun 2018 (yoy). Hal ini terkait dengan jumlah hari kerja pada periode libur lebaran bulan Juni 2018 yang lebih panjang dibanding 2017.

Adapun PDRB dari sisi pengeluaran memperlihatkan bahwa semua komponen pengeluaran pada tahun 2018 tumbuh menguat, kecuali pengeluaran konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga selaku komponen yang paling dominan pada PDRB Pengeluaran tumbuh menguat dari 4,62% pada 2017 menjadi 4,69% pada tahun 2018. Peningkatan konsumsi rumah tangga ini didorong oleh terjaganya daya beli serta tambahan pendapatan berupa program sosial pemerintah dan kenaikan UMK tahun 2018. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang merupakan investasi dalam bentuk fisik meningkat menjadi 7,68% pada tahun 2018, tahun sebelumnya tumbuh 7,50%. Pertumbuhan PMTB didorong oleh peningkatan investasi dalam bentuk barang modal, utamanya investasi tol trans Jawa, bandara, pelabuhan dan bendungan. Di sisi lain, konsumsi pemerintah mengalami penurunan yang dipicu oleh realisasi Dana Desa dan Dana Insentif Daerah yang penyerapannya masih tergolong rendah.

Komponen lainnya yang tumbuh cukup tinggi adalah ekspor dan impor. Ekspor produk dari Jawa Tengah ke luar negeri dan ke provinsi lain di Indonesia tumbuh 11,42% pada 2018, tahun sebelumnya hanya 7,39%. Adapun impor dari luar negeri dan dari provinsi lain tumbuh 12,42% di tahun yang sama. Lebih lengkap data Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Pertumbuhan Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran
Tahun 2017-2018

NO	KOMPONEN	PERSEN (%)		
		2016	2017	2018
1	Konsumsi Rumah tangga	2,75	4,62	4,69
2	Konsumsi LNPRT	0,06	4,43	7,62
3	Konsumsi Pemerintah	-0,04	3,07	2,98
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,72	7,50	7,68
5	Perubahan Inventori	0,06	4,97	5,92
6	Ekspor Luar Negeri dan Antar Daerah	2,03	7,39	11,42
7	Impor Luar Negeri dan Antar Daerah	1,30	7,87	12,42
	PDRB	5,27	5,26	5,32

Sumber : BPS Jateng, 2018

Tabel 1.2. di atas menunjukkan nilai impor yang meningkat di tahun 2018 yang berkorelasi positif dengan kenaikan investasi berupa pembangunan pabrik-pabrik maupun infrastruktur lainnya. Meningkatnya impor barang modal terutama berupa mesin-mesin yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan PLTU serta investasi pembelian mesin oleh swasta. Komponen mesin dan perlengkapannya yang paling banyak diimpor meliputi impor mesin pembangkit, alat listrik dan alat telekomunikasi.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 dibandingkan dengan provinsi di Jawa lainnya dapat dilihat pada tabel 1.3. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada periode tersebut mengalami pertumbuhan, bersama dengan provinsi-provinsi lainnya di Jawa kecuali DKI Jakarta yang melemah.

Tabel 1.3.
Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017-2018

NO	PROVINSI/NASIONAL	PERSEN (%)		
		2016	2017	2018
1	DKI Jakarta	5,88	6,20	6,17
2	Jawa Barat	5,28	5,35	5,64

NO	PROVINSI/NASIONAL	PERSEN (%)		
		2016	2017	2018
3	Jawa Tengah	5,66	5,26	5,32
4	DIY	5,27	5,26	6,20
5	Jawa Timur	5,05	5,46	5,50
6	Banten	5,57	5,73	5,81
	Nasional	5,03	5,07	5,17

Sumber : BPS Jateng, 2018

c. Sumber Pertumbuhan PDRB

Sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 dari sisi lapangan usaha dengan kontribusi terbesar dari industri pengolahan sebesar 1,50% disusul dengan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,82% serta konstruksi sebesar 0,63%. Sedangkan pertanian yang termasuk lapangan usaha unggulan berkontribusi sebesar 0,35% terhadap total pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Keempat lapangan usaha unggulan tersebut berkontribusi sebesar 3,31% dari 5,32% pertumbuhan yang terjadi di Jawa Tengah tahun 2018. Tabel 1.4. memperlihatkan sumber pertumbuhan menurut lapangan usaha secara lengkap.

Tabel 1.4.

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2018

LAPANGAN USAHA		PERSEN (%)		
		2016	2017	2018
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,32	0,23	0,35
2	Pertambangan dan Penggalian	0,38	0,12	0,06
3	Industri Pengolahan	1,44	1,51	1,50
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi	0,66	0,73	0,63
7	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,80	0,86	0,82
8	Transportasi dan Pergudangan	0,16	0,21	0,25
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,20	0,20	0,26

LAPANGAN USAHA		PERSEN (%)		
		2016	2017	2018
10	Informasi dan Komunikasi	0,34	0,56	0,56
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,24	0,14	0,10
12	Real Estate	0,12	0,12	0,11
13	Jasa Perusahaan	0,04	0,03	0,04
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,07	0,07	0,12
15	Jasa Pendidikan	0,28	0,26	0,29
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,08	0,07	0,07
17	Jasa lainnya	0,13	0,14	0,15
	PDRB	5,27	5,26	5,32

Sumber : BPS Jateng, 2018

Dari sisi PDRB Pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar berasal dari komponen ekspor luar negeri dan antar daerah sebesar 4,21%. Selanjutnya berasal dari konsumsi rumah tangga (2,79%) dan PMTB (2,27%). Jika tanpa impor luar negeri dan antar daerah, potensi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah cukup tinggi yaitu 9,60% yang merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluaran kecuali impor. Artinya bahwa ketika impor mampu ditekan, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dapat terdorong lebih tinggi.

Tabel 1.5.
Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2017-2018

NO	KOMPONEN	PERSEN (%)		
		2016	2017	2018
1	Konsumsi Rumah Tangga	2,75	2,77	2,79
2	Konsumsi LNPRT	0,06	0,04	0,08
3	Konsumsi Pemerintah	-0,04	0,21	0,20
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,72	2,18	2,27
5	Perubahan Inventori	0,06	0,04	0,05
6	Ekspor Luar Negeri dan Antar Daerah	2,03	2,67	4,21
7	Impor Luar Negeri dan Antar Daerah	1,30	2,65	4,28

NO	KOMPONEN	PERSEN (%)		
		2016	2017	2018
	PDRB	5,27	5,26	5,32

Sumber : BPS Jateng, 2018

d. Distribusi PDRB

Kontribusi terbesar pada pembentukan PDRB Jawa Tengah tahun 2018 adalah pada lapangan usaha industri pengolahan sebesar 34,50% disusul oleh pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 14,04% dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,51% serta konstruksi sebesar 10,73%. Secara keseluruhan keempat kategori tersebut mempunyai kontribusi 72,78% dalam PDRB Jawa Tengah.

Khusus lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang merupakan lapangan usaha paling banyak menyerap pekerja, kontribusinya mengalami penurunan dari 14,38% pada tahun 2017 menjadi 14,04%. Dengan kata lain ada pengurangan kontribusi sebesar 0,34 poin. Secara lengkap, struktur PDRB Jawa Tengah Tahun 2017-2018 menurut lapangan usaha, dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6.
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2018

KATEGORI	STRUKTUR (%)			
		2016	2017	2018
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,06	14,38	14,04
B	Pertambangan dan Penggalian	2,51	2,56	2,59
C	Industri Pengolahan	34,90	34,63	34,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,10
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	10,24	10,49	10,73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,43	13,53	13,51
H	Transportasi dan Pergudangan	3,05	3,11	3,12
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,18	3,09	3,11
J	Informasi dan Komunikasi	3,03	3,34	3,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,18	2,98	2,95
L	Real Estate	1,66	1,69	1,69
M,N	Jasa Perusahaan	0,36	0,38	0,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,86	2,82	2,75

KATEGORI	STRUKTUR (%)			
		2016	2017	2018
P	Jasa Pendidikan	4,27	4,41	4,50
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,85	0,88	0,89
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,52	1,56	1,59
	PDRB	100	100	100

Sumber : BPS Jateng, 2018

Kontribusi lapangan usaha unggulan di Jawa Tengah terhadap lapangan usaha yang sama di tingkat nasional tersaji pada tabel 1.7. Industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang kontribusinya meningkat di tingkat nasional, yaitu meningkat dari 14,82% pada tahun 2017 menjadi 14,85% pada tahun 2018. Peningkatan peranan industri pengolahan di tingkat nasional menunjukkan bahwa pembangunan lapangan usaha tersebut memberikan hasil yang baik.

Tabel 1.7.

**Kontribusi Pertanian, Industri, Perdagangan dan Konstruksi
Jawa Tengah terhadap Nasional Tahun 2017-2018 (%)**

Lap Usaha Unggulan	2017	2018
Pertanian	9,43	9,37
Industri	14,82	14,85
Konstruksi	8,72	8,71
Perdagangan	8,97	8,87

Sumber : BPS Jateng, 2018

Berdasarkan PDRB Pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan peranan 60,58% pada Tahun 2018, disusul Ekspor Luar Negeri dan Antar Daerah sebesar 42,40% dan PMTB yang berperan 32,61%. Peranan konsumsi rumah tangga sedikit lebih rendah dari tahun 2017 yang besarnya 60,93%. Peningkatan kontribusi PMTB sebanyak 1,33 poin dari 31,28% menjadi 32,61% menunjukkan bahwa pada tahun 2018 investasi di Jawa Tengah meningkat cukup signifikan.

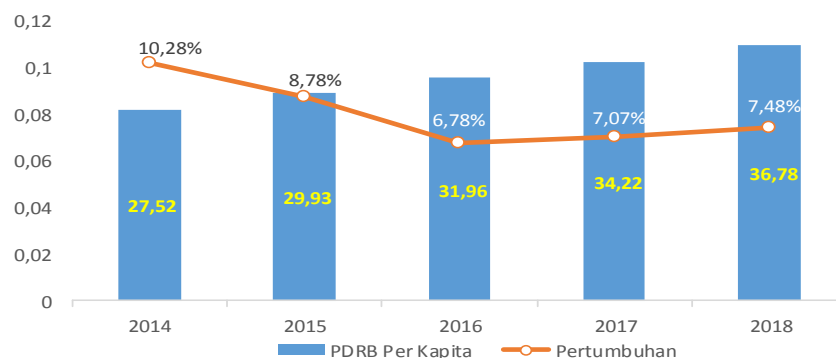
Tabel 1.8.
Struktur PDRB Menurut Pengeluaran
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2016-2018

KOMPONEN		STRUKTUR (%)		
		2016	2017	2018
1	Konsumsi Rumah Tangga	60,98	60,93	60,58
2	Konsumsi LNPRT	1,12	1,12	1,14
3	Konsumsi Pemerintah	8,05	8,04	7,78
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,55	31,28	32,61
5	Perubahan Inventori	0,75	0,82	1,24
6	Ekspor Luar Negeri dan Antar Daerah	38,08	39,59	42,40
7	Impor Luar Negeri dan Antar Daerah	39,54	41,78	45,75
PDRB		100	100	100

Sumber : BPS Jateng, 2018

e. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku pada Tahun 2018 sebesar Rp36,78 juta meningkat sebesar 7,48% dibanding PDRB per kapita Tahun 2017 sebesar Rp34,22 juta. Mulai tahun 2016, trend pertumbuhan PDRB Perkapita Jawa Tengah menunjukkan peningkatan yang ditunjukkan dengan Gambar 1.2.



Grafik 1.1. PDRB Perkapita Jateng (Rp Juta) dan Pertumbuhannya Tahun 2014-2018

f. Inflasi

Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 mampu mengendalikan inflasi di bawah tiga persen. Pada tahun tersebut besaran inflasi yang terjadi hanya 2,82%, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2017, yaitu 3,71%. Inflasi Jawa Tengah juga lebih rendah dibandingkan

dengan inflasi nasional yang besarnya 3,13%. Di antara provinsi di pulau Jawa, besaran inflasi Jawa Tengah terendah kedua setelah DIY dengan besaran inflasi 2,66%. Perkembangan inflasi Jawa Tengah dibandingkan dengan Provinsi se-Jawa dan Nasional Tahun 2016-2018 dapat dilihat pada Tabel 1.9.

Tabel 1.9.
Perkembangan Inflasi Tahun 2016-2018

NO	PROVINSI/NASIONAL	Inflasi (%)		
		2016	2017	2018
1	DKI Jakarta	2,37	3,72	3,27
2	Banten	2,94	3,98	3,42
3	Jawa Barat	2,75	3,63	3,54
4	Jawa Tengah	2,36	3,71	2,82
5	DIY	2,29	4,20	2,66
6	Jawa Timur	2,74	4,04	2,86
	Nasional	3,02	3,61	3,13

Sumber : BPS Jateng, 2018

Kontribusi terbesar penurunan laju inflasi Jawa Tengah tahun 2018 adalah kelompok Bahan Makanan dengan sub kelompok Padi-padian, Umbi-umbian dan hasilnya. Hal ini dipicu oleh periode panen padi masa tanam April-September 2018 yang menjamin tingginya pasokan beras yang selanjutnya berdampak pada penurunan harga komoditas beras.

g. Ekspor dan Impor

Nilai ekspor total Jawa Tengah tahun 2018 mencapai 6.587,77 juta US\$ atau meningkat 9,95 % dibandingkan dengan tahun 2017 yang nilainya 5.991,37 juta US\$ dan didominasi oleh barang non migas dengan porsi 97,72% terhadap ekspor. Pada tahun 2018, ekspor non migas Jawa Tengah mencapai 6.437,42 juta US\$, atau meningkat 11,62% dibanding tahun 2017 yang nilainya 5.767,44 juta US\$. Komoditas non migas utama yang mempunyai nilai ekspor tertinggi antara lain produk dan barang tekstil, kayu dan kayu olahan, serta bermacam barang hasil industri dengan negara tujuan utama yaitu: Amerika Serikat, Jepang dan Tiongkok.

Selanjutnya untuk impor Jawa Tengah pada tahun 2018 mencapai 14.779,38 juta US\$ atau naik 38,67% dibandingkan dengan tahun 2017 yang didominasi impor non migas sebanyak 61,87%. Pada tahun 2018, impor non migas Jawa Tengah mencapai 9.144,12 juta US\$ atau naik 41,32%

dibandingkan kondisi tahun 2017 yang besarnya 6.470,59 juta US\$ dan belum mencapai target yaitu 5.729 juta US\$.

Negara pemasok barang impor terbesar ke Jawa Tengah adalah Tiongkok, Arab Saudi, dan Nigeria. Komoditas impor utama meliputi produk mineral, pesawat mekanik, serta tekstil dan barang.

Tabel 1.10.
Nilai Ekspor dan Impor Jawa Tengah Tahun 2017-2018

Uraian	Tahun 2017 (Juta US \$)	Tahun 2018 (Juta US\$)	Perkembangan 2018 – 2017 (Juta US\$)
Ekspor	5 991 ,37	6 587 ,77	596.40
- Migas	223 ,93	150 ,35	(73.58)
- Non Migas	5 767 ,44	6 437 ,42	669.98
Impor	10 658 ,25	14 779 ,38	4,121.14
- Migas	4 187 ,66	5 635 ,27	1,447.61
- Non Migas	6 470 ,59	9 144 ,12	2,673.53

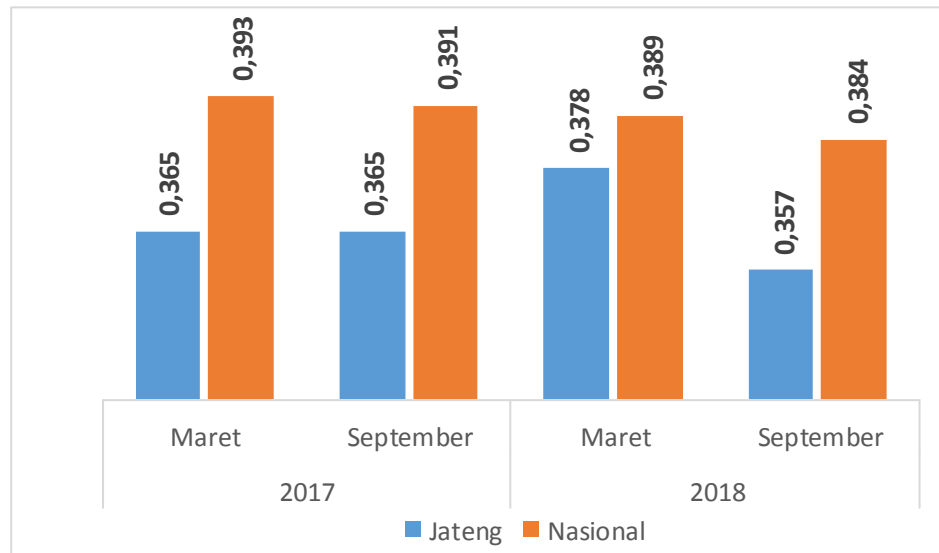
Sumber : BPS Jateng, 2018

Hal yang harus digarisbawahi dari peningkatan impor Jawa Tengah terutama dalam bentuk non bangunan, yaitu barang modal selain peralatan transportasi dan aksesoris barang modal untuk kepentingan industri. Hal tersebut juga tercermin dari pertumbuhan impor komoditas mesin dan alat transportasi. Berdasarkan komoditasnya, peningkatan impor permesinan terutama berupa mesin pembangkit listrik, mesin industri dan perlengkapan, dan mesin listrik, aparat dan peralatannya. Peningkatan impor barang modal ini sejalan dengan menguatnya kinerja investasi non bangunan pada periode laporan, terutama terkait dengan penyelesaian investasi pembangkit listrik di sejumlah daerah di Jawa Tengah.

h. Indeks Gini dan Indeks Williamson

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Pada September 2018, Indeks Gini Jawa Tengah mencapai 0,357 dibanding bulan September 2017 mengalami penurunan dengan besaran 0,08 poin. Dibandingkan dengan Nasional, indeks Gini Jawa Tengah masih jauh lebih rendah. Pada September 2018, indeks Gini nasional sebesar 0,384 sedangkan Jawa Tengah 0,357.

Ini berarti bahwa ketimpangan pendapatan antar penduduk di Jawa Tengah semakin membaik dan lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Gambar 1.3 memperlihatkan perbandingan Indeks Gini Jawa Tengah dengan Nasional.



**Grafik 1.2. Perbandingan Indeks Gini Jawa Tengah dengan Nasional
Maret 2017 – September 2018**

Indeks Gini penduduk Jawa Tengah di Perkotaan jauh lebih besar dibandingkan dengan pedesaan. Pada September 2018, indeks Gini penduduk Jawa Tengah di Pedesaan sebesar 0,315 sedangkan untuk perkotaan sebesar 0,377. Artinya bahwa masalah ketimpangan pendapatan terutama terjadi di perkotaan. Meskipun demikian, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Jawa Tengah dari Maret 2017 cenderung menurun, baik penduduk yang di pedesaan maupun perkotaan (lihat Tabel 1.11).

**Tabel 1.11.
Gini Rasio Jawa Tengah Menurut Desa – Kota
Tahun 2017 – 2018**

Uraian	2017		2018	
	Maret	September	Maret	September
Desa	0.327	0.323	0.336	0.315
Kota	0.386	0.383	0.400	0.377
Desa+Kota	0.365	0.365	0.378	0.357

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018

Banyak upaya yang dilakukan dalam rangka menurunkan ketimpangan pendapatan penduduk di Jawa Tengah. Beberapa di antaranya adalah optimalisasi realisasi investasi yang menyerap banyak tenaga kerja dan pengembangan berbagai kawasan industri pendukungnya; pengembangan berbagai kegiatan pendukung sektor riil; optimalisasi pengembangan wirausaha baru dan fasilitasi akses perbankan bagi pelaku usaha; serta dukungan iklim usaha kondusif.

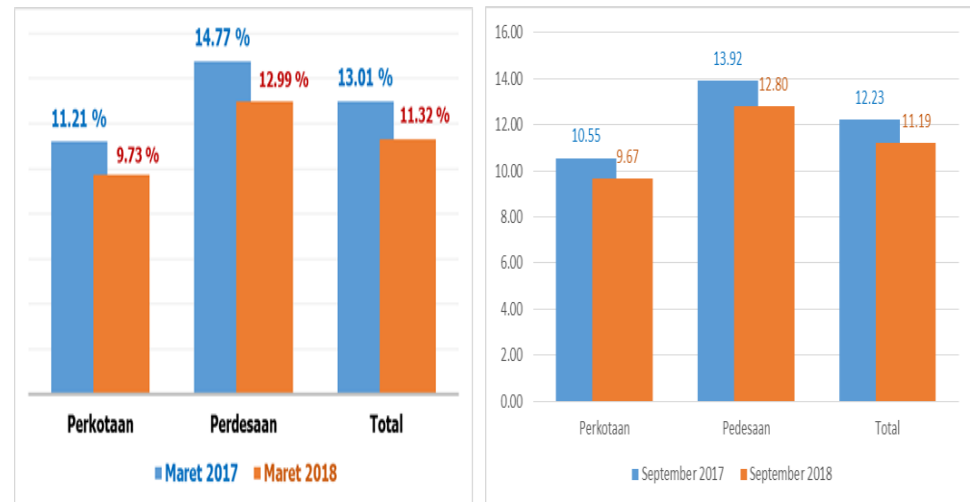
Kesenjangan pembangunan antar wilayah dapat diukur dengan Indeks Williamson. Makin besar nilai Indeks Williamson suatu daerah menunjukkan makin timpang kesenjangan pembangunan antar wilayah. Indeks Williamson Jawa Tengah Tahun 2017 sebesar 0,6234, sedikit lebih tinggi dari angka capaian Tahun 2016 yaitu sebesar 0,6210 sedangkan untuk Tahun 2018 belum dirilis BPS.

Untuk pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan upaya antara lain melalui alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dan desa, pembangunan infrastruktur untuk mendorong investasi, pembangunan kawasan perbatasan serta pengembangan wilayah.

i. Penduduk Miskin dan Pengangguran

Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada periode September 2018 sebanyak 3,867 juta jiwa atau 11,19%, mengalami penurunan sebanyak 330 ribu jiwa atau turun 1,04% dibandingkan September 2017 yaitu sebesar 12,23%. Penurunan persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah merupakan penurunan tertinggi se-Indonesia. Pada September 2018, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 11,19%, menurun 0,13% dibandingkan kondisi Maret 2018.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengupayakan Berbagai program maupun kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan mengurangi beban pengeluaran dan ketimpangan, meningkatkan pendapatan, pengembangan usaha kecil dan mikro, dan sinergitas serta peningkatan kerjasama penanganan lintas sektor, pelibatan swasta, perguruan tinggi, perbankan, unsur masyarakat, pemerintah pusat/kabupaten-kota.



Grafik 1.3. Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Menurut Perdesaan dan Perkotaan Periode Maret 2017 – September 2018

Penurunan persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada periode September 2017 – September 2018 lebih besar terjadi di perdesaan yang turun sebesar 1,12% dari 13,92% pada September 2017 menjadi 12,80% pada September 2018. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penyaluran bantuan, pelaksanaan dan penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan telah dinikmati oleh orang miskin. Sedangkan pada wilayah perkotaan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,88% dari 10,55% pada September 2017 menjadi 9,67% pada September 2018 (Gambar 1.4 dan Tabel 1.12).

Tabel 1.12.

Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Menurut Perdesaan dan Perkotaan Maret 2017 – September 2018

Periode	2017			2018		
	K	D	Total	K	D	Total
Maret	11.21	14.77	13.01	9.73	12.99	11.32
September	10,55	13,92	12,23	9,67	12,80	11,19

Sumber : BPS Jateng, 2018

Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dilakukan dengan berbagai program perlindungan sosial diantaranya melalui Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Jateng Sejahtera (KJS), jaminan kesehatan masyarakat, Kartu Tani dan Kartu Nelayan, Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan subsidi listrik murah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dilakukan melalui intervensi pemberdayaan kepala rumah tangga produktif yang difokuskan pada sektor pertanian, pengolahan hasil, dan pemasaran produk dengan didukung peningkatan kesempatan perluasan serta peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dalam rangka pengembangan usaha mikro kecil dilakukan dengan bantuan ekonomi produktif, peningkatan akses permodalan dengan bunga rendah, pendampingan usaha dan pemasaran, pengembangan kewirausahaan desa. Disamping itu, dilakukan pula pengembangan infrastruktur desa, peningkatan akses air minum, sanitasi lingkungan, dan stimulasi pemugaran RTLH. Adapun perbandingan persentase penduduk miskin se-Jawa periode September 2017 – 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.13.

Tabel 1.13.
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin se-Jawa
Periode September 2017 & September 2018

No	Provinsi/Nasional	2017	2018
		%	%
1	DKI Jakarta	3,78	3,55
2	Jawa Barat	7,83	7,25
3	Jawa Tengah	12,23	11,19
4	DI Yogyakarta	12,36	11,81
5	Jawa Timur	11,20	10,85
6	Banten	5,59	5,25
	Nasional	10,12	9,66

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018 (Kondisi September 2017 dan 2018)

Berdasarkan kondisi data terakhir yang dikeluarkan BPS tingkat kemiskinan kabupaten/kota yaitu Maret 2018, persentase penduduk miskin di semua kab/kota di Jawa Tengah mengalami penurunan dibanding kondisi Maret 2017 dengan range penurunan antara 0,23–3,55 poin. Penurunan tertinggi terjadi di Kabupaten Banyumas yang turun 3,55 poin, selanjutnya diikuti oleh Purbalingga turun sebesar 3,18 poin, Kabupaten Rembang turun 2,94 poin, Kabupaten Wonosobo turun 2,74 poin, dan Kabupaten Cilacap turun sebesar 2,69 poin, secara rinci dapat dicermati pada Tabel 1.14.

Tabel 1.14.
Persentase Penduduk Miskin menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Periode Maret 2017 – 2018 (%)

Kode	Kab/Kot	Maret 2017	Maret 2018	Perubahan
1	Kab. Cilacap	13,94	11,25	-2.69
2	Kab. Banyumas	17,05	13,50	-3.55
3	Kab. Purbalingga	18,80	15,62	-3.18
4	Kab. Banjarnegara	17,21	15,46	-1.75
5	Kab. Kebumen	19,60	17,47	-2.13
6	Kab. Purworejo	13,81	11,67	-2.14
7	Kab. Wonosobo	20,32	17,58	-2.74
8	Kab. Magelang	12,42	11,23	-1.19
9	Kab. Boyolali	11,96	10,04	-1.92
10	Kab. Klaten	14,15	12,96	-1.19
11	Kab. Sukoharjo	8,75	7,41	-1.34
12	Kab. Wonogiri	12,90	10,75	-2.15
13	Kab. Karanganyar	12,28	10,01	-2.27
14	Kab. Sragen	14,02	13,12	-0.90
15	Kab. Grobogan	13,27	12,31	-0.96
16	Kab. Blora	13,04	11,90	-1.14
17	Kab. Rembang	18,35	15,41	-2.94
18	Kab. Pati	11,38	9,90	-1.48
19	Kab. Kudus	7,59	6,98	-0.61
20	Kab. Jepara	8,12	7,00	-1.12
21	Kab. Demak	13,41	12,54	-0.87
22	Kab. Semarang	7,78	7,29	-0.49
23	Kab. Temanggung	11,46	9,87	-1.59
24	Kab. Kendal	11,10	9,84	-1.26
25	Kab. Batang	10,80	8,69	-2.11
26	Kab. Pekalongan	12,61	10,06	-2.55
27	Kab. Pemalang	17,37	16,04	-1.33
28	Kab. Legal	9,90	7,94	-1.96
29	Kab. Brebes	19,14	17,17	-1.97
30	Kota Magelang	8,75	7,87	-0.88
31	Kota Surakarta	10,65	9,08	-1.57
32	Kota Salatiga	5,07	4,84	-0.23
33	Kota Semarang	4,62	4,14	-0.48
34	Kota Pekalongan	7,47	6,75	-0.72
35	Kota Tegal	8,11	7,81	-0.30

Sumber : BPS Jateng, 2018

Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah periode Agustus 2018 sebesar 4,51% turun 0,06 poin dibandingkan dengan Agustus 2017 sebesar 4,57%. Dibandingkan dengan Nasional, Tingkat Pengangguran

Terbuka di Jawa Tengah masih lebih rendah, yaitu untuk nasional 5,34%. Upaya yang telah dilakukan antara lain: menarik investor yang padat karya dengan cara memberi kemudahan dalam proses perizinan, peningkatan kapasitas keterampilan tenaga kerja di Balai Latihan Kerja, dan penyebarluasan informasi pasar kerja, serta pembinaan masyarakat penganggur melalui pengembangan kewirausahaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan provinsi se-Jawa periode Agustus 2017 – 2018 dapat dilihat pada Tabel 1.15.

Tabel 1.15.
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka se-Jawa
Periode Agustus 2017 – 2018

NO	PROVINSI/NASIONAL	2017	2018
1	DKI Jakarta	7,14	6,24
2	Jawa Barat	8,22	8,17
3	Jawa Tengah	4,57	4,51
4	DI Yogyakarta	3,02	3,35
5	Jawa Timur	4,00	3,99
6	Banten	9,28	8,52
	Nasional	5,50	5,34

Sumber : BPS Jateng, 2018 (Kondisi Agustus 2017 dan 2018)

j. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan instrumen ukur untuk melihat kemajuan pembangunan manusia di suatu daerah dengan melihat data yang mencerminkan kemajuan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Perkembangan IPM Jawa Tengah yang dihitung berdasarkan metode baru dengan indikator: usia harapan hidup, angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. IPM Jawa Tengah Tahun 2017 sebesar 70,52 mengalami kenaikan sebesar 0,54 poin dibandingkan Tahun 2016 namun masih sedikit dibawah IPM Nasional sebesar 70,81. Dengan perkembangan tersebut, status pembangunan manusia Provinsi Jawa Tengah sudah termasuk dalam kategori tinggi (nilai IPM 70 – 80). Angka IPM 2018 sampai saat ini belum dirilis BPS.

Jika dilihat komponen pembentuk IPM, semuanya mengalami peningkatan. Pada Tahun 2017, komponen IPM yang mengalami peningkatan tertinggi adalah *Purchasing Power Parity* (PPP) yang

meningkat 2,21%. Selanjutnya diikuti oleh peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 1,68%. Peningkatan RLS Jawa Tengah pada tahun 2016 lebih rendah daripada peningkatan RLS secara nasional yang tumbuh 1,89%.

Tabel 1.16
IPM Jawa Tengah dan Nasional Serta Komponennya

Komponen	Jateng			Nasional		
	2016	2017	Growth (%)	2016	2017	Growth (%)
UHH (Thn)	74,02	74,08	0,08	70,90	71,06	0,23
HLS (Thn)	12,45	12,57	0,96	12,72	12,85	1,02
RLS (Thn)	7,15	7,27	1,68	7,95	8,10	1,89
PPP (Rp Ribu)	10 153	10 377	2,21	10 420	10 664	2,34
IPM	69,98	70,52	0,77	70,18	70,81	0,90

Keterangan: UHH: Usia Harapan Hidup; HLS: Harapan Lama Sekolah; RLS: Rata-rata Lama Sekolah; PPP: *Purchasing Power Parity*

Perkembangan IPM Jawa Tengah Tahun 2016-2017 dibandingkan dengan provinsi tetangga dan Nasional dapat dilihat pada Tabel 1.17.

Tabel 1.17.
Perkembangan IPM Tahun 2016-2017

NO	PROVINSI/NASIONAL	CAPAIAN IPM		PROSENTASE PERTUMBUHAN IPM (YOY)
		2016	2017	
1	DKI Jakarta	79,60	80,06	0,58
2	Jawa Barat	70,05	70,69	0,91
3	Jawa Tengah	69,98	70,52	0,77
4	DI Yogyakarta	78,38	78,89	0,65
5	Jawa Timur	69,74	70,27	0,76
6	Banten	70,96	71,42	0,65
	Nasional	70,18	70,81	0,90

Sumber : BPS Jateng, 2018 diolah

Sedangkan perkembangan IPM Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2016-2017 dapat dilihat pada Tabel 1.18 sebagai berikut:

Tabel 1.18.
Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Tahun 2016-2017

NO.	KAB/KOTA	IPM	
		2016	2017
1	Cilacap	68,60	68,90
2	Banyumas	70,49	70,75
3	Purbalingga	67,48	67,72
4	Banjarnegara	65,52	65,86
5	Kebumen	67,41	68,29
6	Purworejo	70,66	71,31
7	Wonosobo	66,19	66,89
8	Magelang	67,85	68,39
9	Boyolali	72,18	72,64
10	Klaten	73,97	74,25
11	Sukoharjo	75,06	75,56
12	Wonogiri	68,23	68,66
13	Karanganyar	74,90	75,22
14	Sragen	71,43	72,40
15	Grobogan	68,52	68,87
16	Blora	66,61	67,52
17	Rembang	68,60	68,95
18	Pati	69,03	70,12
19	Kudus	72,94	73,84
20	Jepara	70,25	70,79
21	Demak	70,10	70,41
22	Semarang	72,40	73,20
23	Temanggung	67,60	68,34
24	Kendal	70,11	70,62
25	Batang	66,38	67,35
26	Pekalongan	67,71	68,40
27	Pemalang	64,17	65,04
28	Tegal	65,84	66,44
29	Brebes	63,98	64,86
30	Kota Magelang	77,16	77,84
31	Kota Surakarta	80,76	80,85
32	Kota Salatiga	81,14	81,68
33	Kota Semarang	81,19	82,01
34	Kota Pekalongan	73,32	73,77
35	Kota Tegal	73,55	73,95
	Jawa Tengah	69,98	70,52

Sumber : BPS Jateng, 2018

k. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IPG di Jawa Tengah tahun 2013 – 2017 terus sebesar 91,94 masih di atas IPG nasional yaitu 90,96. Jika dibandingkan dengan capaian IPG di pulau Jawa dan Bali, Jawa Tengah menduduki posisi ke-4 setelah DKI Jakarta, DIY, dan Bali. Pada komponen pembentuk IPG yang masih jadi perhatian adalah capaian rata-rata lama sekolah perempuan dan pengeluaran per kapita. Kondisi capaian perkembangan IPG Kab/Kota terdapat 22 Kab/Kota diatas capaian provinsi dan 13 Kab/Kota di bawah provinsi.

Sedangkan IDG di Jawa Tengah tahun 2013-2017 mencapai 75,10, Capaian IDG berada diatas rata-rata Nasional (71,74) bahkan tertinggi se Jawa-Bali. Namun masih ada komponen pembentuk IDG yang menjadi perhatian yaitu keterlibatan perempuan di parlemen. Sedangkan kondisi capaian IDG Kab/Kota terdapat 9 Kab/Kota diatas capaian Provinsi dan 26 Kab/Kota dibawah capaian Provinsi. Data IPG dan IDG tahun 2018 sampai saat ini belum dirilis BPS.

l. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk menilai kesejahteraan petani. NTP dihitung melalui perbandingan kemampuan tukar barang-barang produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. NTP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar 102,25. Bila dibandingkan dengan NTP 2017 sebesar 100,40 maka mengalami peningkatan sebesar 1,85 poin. Jika dibandingkan dengan nasional (102,46), NTP Jawa Tengah tahun 2018 lebih rendah meskipun tidak terlalu jauh berbeda, hanya selisih 0,21 poin. Meskipun demikian, NTP Jawa Tengah masih lebih tinggi dibandingkan dengan NTP DKI Jakarta, Banten dan DIY, data selengkapnya sebagaimana pada Tabel 1.19.

Tabel 1.19.
Nilai Tukar Petani Tahun 2017-2018

NO	PROVINSI/NASIONAL	NTP	
		2017	2018
1	DKI Jakarta	98,29	99,38
2	Banten	99,75	99,70
3	Jawa Barat	104,93	109,01
4	Jawa Tengah	100,40	102,25
5	DIY	102,08	100,77
6	Jawa Timur	104,10	106,62
	Nasional	101,28	102,46

Sumber : BPS Jateng, 2018 (merupakan angka Rata-rata)

Perbaikan NTP Jawa Tengah ini sejalan dengan peningkatan kinerja lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yang pada tahun 2018 mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,63% yang lebih tinggi dibandingkan dengan prosentase pertumbuhannya di tahun 2017 yang tercatat sebesar 1,66% (yoy).